



Judul : Publik menanti tindak lanjut DPR
Tanggal : Rabu, 03 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Publik Menanti Tindak Lanjut DPR

Meski Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan keputusan soal DPR mencabut kebijakannya, termasuk soal tunjangan, belum tampak ada tindak lanjut dari DPR. Badan Urusan Rumah Tangga DPR masih akan mengonsultasikannya dengan pimpinan DPR.

JAKARTA, KOMPAS—Tindak lanjut DPR terkait keputusan menghapus tunjangan perumahan serta moratorium perjalanan dinas luar negeri masih belum jelas hingga kini. Badan Urusan Rumah Tangga DPR masih menanti pimpinan DPR. Sementara desakan agar DPR segera menindaklanjuti keputusan tersebut untuk merespons tuntutan dari publik terus bergulir.

Keputusan bahwa DPR akan mencabut beberapa kebijakannya, termasuk soal tunjangan, dan moratorium dinas luar negeri anggota DPR di sampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah bertemu pimpinan DPR, MPR, dan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Sebelumnya, publik dibuat kecewa dengan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ditambah lagi adanya sejumlah anggota DPR yang pergi ke luar negeri saat publik menuntut tunjangan perumahan itu dicabut.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, pernyataan Presiden seharusnya menjadi pegangan semua pihak. Oleh karena itu, setelah pertemuan yang dihadiri Presiden bersama Ketua DPR Purn Mahandani dan Ketua MPR Ahmad Muzani, sepatutnya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR segera menanggapi rapat untuk menindaklanjuti arahan tersebut.

"Tentu BURT di dalam membahas anggaran DPR akan menelaah kembali dan petunjuk dari pimpinan DPR," ujar Said, saat ditemui, Selasa (2/9), di Jakarta.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, kesepakatan pertama adalah pendirian tunjangan perumahan. Keputusan ini bukan semata persoalan rasionalitas anggaran atau pemenuhan dari antara fraksi-fraksi DPR, melainkan juga soal etika, empati, dan simpati yang harus ditunjukkan oleh anggota DPR.

Said tidak merinci tunjangan apa saja yang akan dicabut selain tunjangan perumahan. Ia hanya menjelaskan, tata kelola tunjangan bagi anggota DPR diserahkan ke BURT DPR.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah anggota DPR akan kembali menempati rumah dinas setelah tunjangan rumah dicabut, Said meminta menunggu keputusan BURT DPR. "Oleh karena itu, agar tata kelolanya sempurna, kita kembalikan dari secepatnya BURT DPR melakukan itu atas arahan dari petunjuk pimpinan DPR," katanya.

Sementara itu, Ketua BURT DPR Tuzki Aulia Na-

takusumah menyampaikan, DPR akan berpegang pada arahan Presiden dan ketua umum partai.

Namun, untuk pencabutan tunjangan perumahan dan moratorium perjalanan dinas luar negeri bagi anggota DPR masih perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan pimpinan DPR.

"Jadi, ya, nanti kami akan konsultasi dengan pimpinan Dewan dan kami tindak lanjut selanjutnya," ucapnya.

Saat ditanya wartawan kapan keputusan akan diambil, Ruzki tidak memberi jawaban tegas. Ia beralasan tidak ikut dalam rapat Presiden dengan para ketua umum partai. "Saya kemarin, yang ikut di situ dengan pimpinan DPR. Jadi, selanjutnya nanti kami akan konsultasikan," katanya.

Terkait keputusan tunjangan perumahan dan moratorium perjalanan dinas bagi anggota DPR, Kompas telah mencoba menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. Namun, hingga berita ini diturunkan, Indra belum memberikan tanggapan.

Kompas juga menghubungi sejumlah pimpinan DPR, seperti Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Akan tetapi, belum ada jawaban.

Sebelum pertemuan Presiden dengan para ketua umum partai serta pimpinan DPR dan MPR, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufrmi Dasco Ahmad telah menyampaikan bahwa tunjangan perumahan DPR hanya akan diberikan hingga Oktober 2025. Uang tunjangan yang telah diterima sejak Oktober 2024 digunakan untuk review rumah hingga masa jabatan anggota DPR 2024-2029 berakhir (Kompas, 27/8/2025).

Segera direspons

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapid), Lucius Kurnias, mengingatkan, publik menanti tindak lanjut dari keputusan mencabut fasilitas dari moratorium dinas luar negeri anggota DPR. Oleh karena itu, ia mendesak pimpinan DPR segera mengambil sikap dan membahasnya bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR.

Pembicaraan terkait pencabutan tunjangan ini, kata dia, salah satu tuntutan masyarakat ke DPR dan oleh karena itu harus direspons secara kolektif oleh DPR," katanya.

Menurut Lucius, lebih baik pimpinan DPR mengkoordinasikan pertemuan semacam rapat pengganti Badan Su-

syarah yang melibatkan pimpinan DPR, pimpinan komisi, pimpinan badan, pimpinan fraksi, dan Sekjen DPR. Dengan pertemuan pleno yang mewakili berbagai unsur, DPR akan terlihat serius menanggapi tuntutan publik.

Namun, jangan sampai DPR berbalas, karena sudah masuk dalam APBN, tunjangan perumahan tidak bisa dibatalkan. Atau berunding di balik prosedur pembahasan anggaran untuk mengelak dari tuntutan menghapus tunjangan perumahan," katanya.

Menurut Lucius, selalu ada mekanisme untuk mengoreksi anggaran yang dinilai tidak relevan. Mekanisme APBN Perubahan bisa diterapkan.

Ia pun menekankan pentingnya proses perubahan itu dibuat terbuka agar publik dapat memahami dinamika pembahasan. Pimpinan DPR pun tak boleh mengabaikan urusan pendayagunaan anggaran hanya kepada Banggar atau BURT.

Sebagai sebuah isu nasional, urusan penghapusan tunjangan harus jadi pembahasan hingga keputusan bersama DPR sebagai lembaga. Jangan sampai pimpinan DPR takut bertanggung jawab hanya karena tidak ingin menjadi sasaran kemarahan publik. Gerakan begini, pimpinan ingin tidak terlihat berkuasa. Kemudian, lihat, *transparensi* sekali," katanya.

RUU Perampasan Aset

Selain soal tunjangan dan fasilitas DPR, tuntutan dari penuntut rasa sejak 25 Agustus lalu juga soal penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, terkait RUU ini pun belum terlihat ada progres di DPR. RUU tersebut saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2025-2029. Padahal, untuk dibahas pemerintah dan DPR, RUU harus terlebih dulu masuk dalam Prolegnas tahunan.

Meski belum terlihat ada progres dari pembahasan RUU ini, Wakil Ketua Badan Legislatif (Badleg) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Purnjanto, menegaskan pembahasan hingga pengesahan RUU Perampasan Aset akan dilakukan sesegera mungkin. Pembahasan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian agar tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya. "Kami tinggal menunggu nasahnya. Dari Badan Keahlian, kami butuh dari itu akan kami bahas. Mengingat RUU Perampasan Aset akan kami lakukan sesegera mungkin. Kami juga harus hati-hati, jangan sampai salah. Tidak boleh tumpang tindih," katanya.

Kebijakan tersebut, kata

Sturman, tidak hanya agar RUU Perampasan Aset tidak bertabrakan dengan undang-undang lainnya. Dia juga ingin memastikan penggunaan RUU tersebut tepat sasaran. "Undang-undang itu harus serasi, sejalan. Supaya tidak berlawanan, maknanya kami harus hati-hati. Ini juga jangan sampai orang-orang yang enggak perlu asennya dirampas, malah jadi dirampas," ujarnya.

Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, jika RUU ini ingin lebih cepat disahkan, bisa saja Presiden Prabowo meminta partai-partai politik pendukungnya yang memiliki perwakilan di DPR segera membahas dan menesahkannya. Apalagi, saat ini, tujuh dari delapan partai di parlemen merupakan bagian dari koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo.

Opsinya, Presiden bisa saja memberikan perintah pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait perampasan aset ini.

Dilarang ke luar negeri

Menyeri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat pengendalian inflasi dengan kepala daerah, di Kantor Kemendagri. Selasa, mengatakan, pihaknya telah meminta kepala daerah dan anggota DPRD untuk tidak dinas ke luar negeri. Mereka diminta bekerja sama dengan pimpinan aparat keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah masing-masing untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu.

"Saya meminta menunda semua keberangkatan kepala daerah dan DPRD ke luar negeri. Biasanya, nanti akan ada izin dari Kementerian, itu semua saya tunda," kata Tito.

Bukan sekadar bepergian ke luar negeri, sebut Tito, pemerintahan juga untuk kegiatan seremonial yang terkesan memboroskan anggaran. Prinsip itu diterapkan pula untuk acara-acara yang diselenggarakan secara pribadi oleh keluarga pejabat. "Tolong ini dijaga betul, termasuk acara pribadi atau keluarga, di momentum saat ini laksanakan secara sederhana," ujarnya.

Akibatis mengesalkan seremoni, Tito menyarankan para kepala daerah untuk membuat kebijakan atau kegiatan pro-rakyat, seperti operasi pasar, gerakan pasar murah, dan pembagian bantuan sosial (bansos). "Itu (program-program) sudah rutin dilakukan. Namun, ini dicekalkan lagi karena masyarakat memerlukan itu," katanya.

CHOW/HTG/NCJ